

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH
DAN EKSPRESI KREATIF
ILMU PENDIDIKAN

Some Techniques to Solve Speaking Problem

Kecerdasan Emosional dan Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Sekolah
Realitas Perubahan Masyarakat Menuju Dromologi Pendidikan Bertentangan
dengan Pilar-pilar Pembelajaran Unesco

Teaching Children to be Creative in Learning

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Langkah Praktis
dalam Implementasi Program Life Skill

Membumikan Pendidikan Karakter di Lembaga Pendidikan Formal

Motivasi Berprestasi (Internal vs Eksternal) terhadap Prestasi Belajar
pada Pembelajaran Kooperatif

Implementasi Pembelajaran *Facilitator and Explaining*
untuk Meningkatkan Hasil Belajar

Peningkatan Kemampuan Mengemas Produk
melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran Barisan Aritmatika dengan Strategi PQ4R bagi Siswa SMK

Meningkatkan Hasil Belajar Logika Matematika
melalui Metode *Problem Based Learning*

English Ellipsis in the Novel of Angels and Demons

Improve Mastery of the Law of Sines and Cosines
through Problem-based Learning in Students

Grammatical Errors on Writing

Korelasi antara Tingkat Pendidikan Orang Tua
dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran PKn

ISSN 1410-9883

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting
Kadeni

Wakil Ketua Penyunting
Syaiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana
R. Hendro Prasetianto
Udin Erawanto
Riki Suliana
Prawoto

Penyunting Ahli
Miranu Triantoro
Masruri
Karyati
Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha
Yunus
Nandir
Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi: STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 111 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 5.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua:** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua:** M. Khafid Irsyadi, ST, S.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan
 Volume 14, Nomor 1, April 2012

Daftar Isi

Some Techniques to Solve Speaking Problem	1
<i>Feri Huda</i>	
Kecerdasan Emosional dan Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Sekolah	8
<i>Kadeni</i>	
Realitas Perubahan Masyarakat Menuju Dromologi Pendidikan Bertentangan dengan Pilar-pilar Pembelajaran Unesco	15
<i>Karyati</i>	
Teaching Children to be Creative in Learning	21
<i>M Ali Mulhuda</i>	
Pemberdayaan Masyarakat sebagai Langkah Praktis dalam Implementasi Program Life Skill ..	25
<i>Miranu Triantoro</i>	
Membumikan Pendidikan Karakter di Lembaga Pendidikan Formal	32
<i>Udin Erawanto</i>	
Motivasi Berprestasi (Internal vs Eksternal) terhadap Prestasi Belajar pada Pembelajaran Kooperatif	44
<i>Agus Budi Santosa</i>	
Implementasi Pembelajaran <i>Facilitator and Explaining</i> untuk Meningkatkan Hasil Belajar	52
<i>Cicik Pramesti</i>	
Peningkatan Kemampuan Mengemas Produk melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek	59
<i>Ekbal Santoso</i>	
Pembelajaran Barisan Aritmatika dengan Strategi PQ4R bagi Siswa SMK	68
<i>Kristiani</i>	
Meningkatkan Hasil Belajar Logika Matematika melalui Metode <i>Problem Based Learning</i> ..	75
<i>Mohamad Khafid Irsyadi</i>	
English Ellipsis in the Novel of Angels and Demons	82
<i>Rainerius Hendro Prasetyanto</i>	
Improve Mastery of the Law of Sines and Cosines through Problem-based Learning in Students	90
<i>Riki Suliana</i>	
Grammatical Errors on Writing	99
<i>Saiful Rifa'i</i>	
Korelasi antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran PKn	104
<i>Sunarno</i>	

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI LANGKAH PRAKTIS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM LIFE SKILL

Miranu Triantoro
STKIP PGRI Blitar
mir.stkip@gmail.com

Abstrak: Pasang surut kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan sejahtera senantiasa menjadi pengalaman yang berharga, karena dengan kondisi riil, suatu bangsa, khususnya masyarakat akan terus belajar introspeksi terhadap apapun yang telah dilakukan untuk dievaluasi dan selanjutnya menentukan agenda dan langkah-langkah riil yang lebih praktis dan efektif dalam memecahkan problematika kehidupan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah yang dirasakan lebih efektif, karena masyarakat secara langsung dilibatkan untuk memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Konsep ini sekaligus merupakan upaya untuk melepaskan ketergantungan dari orang lain. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang baik dan berbudaya.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat; program *life skill*

Abstract: Dynamics of nation's life to create a safe and prosperous life has always been a valuable experience. Because in a real life, a nation and especially a society will learn continuously to introspect everything that has been done to be evaluated and to determine the next agenda and real steps to be more effective and efficient to solve life's problems. Society empowerment is one of more effective steps, because society is involved directly to solve their own problem based on their capacity and capability. This concept is one ways to release from other dependence. Through this empowerment, society is asked to participate actively to solve their own problem by doing varies activities to get necessary knowledge and skill to make a living to fulfill daily life in good and acceptable way.

Key words: Society empowerment; life skill program

PENDAHULUAN

Semenjak begulirnya reformasi hingga menginjak usianya yang ke-20 tahun ini, keberadaan bangsa Indonesia masih belum lepas dari keterpurukan kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, social budaya, politik

maupun kesejahteraan. Eksistensi bangsa Indonesia yang masih terselimuti oleh berbagai persoalan kesejahteraan dan keadilan yang banyak dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat menjadi sebuah pekerjaan yang

memerlukan kearifan dari semua pihak untuk memberikan alternative-alternatif yang dapat dipergunakan dalam memecahkan problematika social yang ada. Apalagi setelah terjadinya “krisis moneter” yang dialami oleh berbagai Negara-negara dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Secara riil kita dapat melihat dan merasakan betapa imbas “krisis moneter” yang sudah lama menimpa bangsa Indonesia benar-benar telah membawa dampak ekonomi dan kesejahteraan yang cukup parah, betapa sebagian masyarakat yang ada (khususnya masyarakat yang termarginalkan) mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup; pengangguran ada dimana-mana karena banyaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan secara sepihak; angka kemiskinan yang belum menunjukkan penurunan sebagaimana yang diharapkan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membidani lahirnya era globalisasi menuntut kemampuan masyarakat yang cukup tinggi untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan arus komunikasi dan transportasi yang mengarah kepada persaingan global. Sementara bangsa kita disibukkan dengan berbagai problematika otonomi daerah sebagai refleksi dari keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”

Memperhatikan berbagai problematika yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, maka pemberdayaan masyarakat merupakan satu hal yang sangat strategis dan penting untuk dilakukan, sebab mereka pada dasarnya memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam memecahkan masalahnya sendiri.

MAKNA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan merupakan istilah yang terkait dengan aktivitas untuk menjadikan “sesuatu” menjadi lebih bermakna dan/atau berguna dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik. Secara etimologis,

istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata “*empowerment*”, yang dalam Oxford English Dictionary, mengandung 2 pengertian, yaitu (1) *to give power to* (memberi kekuasaan; mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), dan (2) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan).

Konsepsi pemberdayaan sebagaimana tersebut di atas jika dikaitkan dengan masyarakat, sudah pasti terfokus pada bagaimana masyarakat yang pada awalnya tidak memiliki daya, baik pengetahuan, ketrampilan dan budaya dapat menjadi masyarakat yang memiliki potensi dalam menghadapi hidup dan kehidupannya, terutama adalah kondisi masyarakat yang termarginalkan atau terpinggirkan, baik karena status ekonomi, social budaya; pendidikan dan ketrampilan maupun kondisi alamnya.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (dalam Ahmad, 2005, 15) dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tiga unsur yang dikembangkan, yakni: (1) upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu, (2) upaya untuk memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat, dan (3) upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan Hutomo (dalam Ahmad, 2005, 15) membedakan makna pemberdayaan menjadi tiga konsep, yaitu (1) pemberdayaan yang hanya berkuat di “daun” dan “ranting” atau pemberdayaan konformis, karena struktur social dan struktur ekonomi sudah dianggap “given”, maka pemberdayaan merupakan usaha bagaimana masyarakat tunadaya haus menyesuaikan dengan yang sudah given tersebut. Adapun bentuk aksi dari konsep ini adalah merubah sikap mental masyarakat tuna daya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan sarana pendidikan dan sejenisnya. (2) pemberdayaan yang hanya berkuat di “batang” atau pemberdayaan reformis, artinya secara umum politik, ekonomi, social dan budaya sudah tidak ada masalah, justru masalah terdapat

pada kebijakan operasional. Oleh karena itu pemberdayaan ini mengubah dari top down menjadi bottom up, sambil mengembangkan sumber daya manusianya, menguatkan kelembagaan dan sejenisnya; dan (3) Pemberdayaan yang hanya berkuat pada “akar” atau pemberdayaan structural, hal ini dikarenakan ketidak berdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu strukturnya yang perlu ditinjau kembali.

Prof. Dr. H. Enceng Mulyana, M.Pd. dalam bukunya “Model Tukar Belajar” (Learning Exchange), dalam perspektif Pendidikan Luar Sekolah, (2008, 51) secara lebih jelas telah memberikan batasan mengenai pemberdayaan sebagai berikut:

“Pemberdayaan adalah upaya memampukan (enabling) masyarakat kecil atau bawahan yang selama ini dianggap tidak atau kurang berperan agar meningkat dan memiliki kemampuan yang lebih baik sehubungan dengan status dan peranan mereka di dalam system social. Pada prinsipnya yang disebut bawahan dapat meliputi karyawan, klien, teman, warga masyarakat, warga belajar dan sebagainya. Steting atau yang disebut sistem sosial dapat berupa dunia usaha, pabrik, organisasi, masyarakat, maupun sistem sosial lainnya. Cara yang dapat dilakukan untuk terjadinya pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan dan kewenangan kepada pihak-pihak yang diberdayakan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan tindakan sesuai dengan kewenangannya”.

Berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, J.C Tukiman Taruna (2001, 1) mengemukakan bahwa dalam sebuah pemberdayaan (empowermen) meliputi sekurang-kurangnya aspek-aspek fisi, intelektual, ekonomi politik dan cultural Artinya pemberdayaan itu mencakup pengembangan kemanusiaan secara total (total human development). Sedangkan aspek-aspeknya meliputi (1) punya kesempatan hak memperoleh akses atas sumber daya dan pelayanan social, (2) menyangkut hak-hak dasar, (3) berkembang

dalam kesamaan, (4) menguntungkan, (5) berkenaan dengan hasrat ataupun kebutuhan individu untuk ikut andil bagi kepentingan bersama (6) Memanfaatkan secara optimal namun wajar apa yang telah tercipta di dunia ini, (7) lebih bercorak moral ketimbang hukum, dan (8) erat berkaitan dengan kebutuhan manusiawi khususnya.

Mencermati refleksi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, maka pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, baik pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang dimilikii, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mandiri dalam rangka menjalani kehidupannya, dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang telah dilakukan, dengan harapan mampu membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

PROGRAM LIFE SKILL

Program Life skill secara konseptual merupakan salah satu manifestasi dari empat pilar pembelajaran yang telah direkomendasikan oleh UNESCO dalam menghadapi era globalisasi, yakni: (1) Learning know or learning to learn, yaitu program pembelajaran hendaknya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga mau dan mampu belajar, (2) Learning to do, artinya bahan belajar yang dipilih hendaknya mampu memberikan suatu pekerjaan alternative kepada peserta didik; (3) Learning to be, yaitu mampu memberikan motivasi untuk hidup dalam era sekarang, dan (4) Learning to live together, artinya pembelajaran yang diberikan harus mampu mmberikan ketrampilan untuk hidup bersama, bermasyarakat, berbangsa dan hidup dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dengan semangat kesamaan dan kesejajaran.

Menurut Satori (dalam Anwar, 2006, 20) Program pendidikan life skill adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal ketrampilan yang praktis, terpakai, terkait

dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Memiliki cakupan yang luas, berinteraksi antara pengetahuan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup lebih mandiri. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pengembangan life skill pada umumnya bersumber pada empat kajian, yaitu (1) the world of work, (2) practical living skill, (3) personal growth and management, dan (4) social skills.

Berbeda dengan pandangan di atas, Departemen Pendidikan Nasional membagi life skills ke dalam dua kategori, yakni (1) General Life skills/kecakapan hidup generik/kecakapan yang bersifat umum yang terdiri dari kecakapan personal dan kecakapan social ;dan (2) Spesific life skill, yang terdiri dari kecakapan akademik dan kecakapan vocational)

1. Kecakapan personal (personal skill), terdiri dari dua hal, yakni:
 - a. Kecakapan mengenal diri (self awareness)
Yaitu penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga Negara, serta menyadari dan bersyukur kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya;
 - b. Kecakapan berpikir rasional (Thinking skills)
Kecakapan untuk menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif
2. Kecakapan social atau kecakapan antar personal (Social skills/interpersonal skills):
 - a. Mencakup kecakapan komunikasi dengan empati artinya sikap yang penuh dengan perhatian dan seni dalam berkomunikasi dua arah, sebab dalam berkomunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan akan tetapi isi dan sampainya pesan yang disertai dengan kesan baik yang akan menumbuhkan hubungan menjadi harmonis.

- b. kecakapan bekerjasama
3. Kecakapan akademik (Academic skills):
Merupakan kecakapan berpikir yang sudah mengara kepada kegiatan yang bersifat akademik atau keilmuan, yang mencakup kecakapan dalam melakukan identifikasi variable dan menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan sesuatu gagasan atau keingintahuan
4. Kecakapan vocational (vocational skills)
Merupakan kecakapan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang ada di masyarakat

Mendasarkan diri pada konsep life skill sebagaimana tersebut di atas, maka dalam sebuah pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup akan diwarnai dengan karakteristik sebagai berikut: (1) terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar, (2) terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama; (3) terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, usaha bersama, (4) terjadi proses penguasaan kecakapan personal, social, vocational, akademik, manajerial, kewirausahaan, (5) terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar, menghasilkan produk bermutu, (6) terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli, (7) terjadi proses penilaian kompetensi, dan (8) terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama.

LANGKAH-LANGKAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat potensial sekali dalam meningkatkan kualitas potensi dan kemampuan warga masyarakat dalam menghadapi tantangan kehidupan yang dijalaninya. Oleh karena itu dalam kurun waktu akhir-akhir ini banyak dilakukan berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan terpinggirkan maupun

berbagai organisasi social kemasyarakatan yang ada, baik ditinjau dari segi ekonomi, social budaya, maupun yang lainnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat ini pada awalnya dikembangkan oleh Kindervater dalam menyelesaikan program doktornya yang mengkaji Pendidikan Nonformal di Indonesia dan Thailand (Mulyana, 2008,48). Dalam tulisannya, beliau menyampaikan bahwa pemberdayaan dapat terjadi melalui beberapa tahap, diantaranya adalah: 1. Masyarakat mengembangkan sebuah kesadaran awal, bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh sperangkat ketrampilan agar mampu bekerja lebih banyak. 2. Mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidak mampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri; 3. Masyarakat bekerjasama untuk berlatih lebih banyak melalui pengambilan keputusan dan sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka;

Secara lebih jelas, Kindervater (dalam Mulyana, 2008, 53-57) menjelaskan ada 8 langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pendidikan masyarakat untuk pemberdayaan yang terangkum dalam "Guidelenes for action", yakni: 1. Menyusun kelompok kecil sebagai penerima awal atas rencana program pemberdayaan. Dalam hal ini diupayakan untuk menemukan dua atau tiga orang yang akan dijadikan tim perencana, dengan memperhatikan syarat (a) harus memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan program dan implementasinya (b) tertarik terhadap model pendekatan bahwa pelibatan warga belajar dalam pemecahan masalah adalah penting. 2. Mengidentifikasi/membangun kelompok peserta belajar tingkat wilayah. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa pemecahan masalah secara kolektif merupakan dasar proses pemberdayaan, sehingga pengorganisasian kelompok peserta belajar harus diciptakan dengan fungsi pemberdayaan. Kelompok ini barang kali tersusun atas anggota-anggota atas latar belakang yang beragam, dan barang kali merupakan kelompok baru dibentuk atau bahkan mungkin/dapat pula berasal dari kelompok

yang sudah (lama) ada. Kelompok terdiri dari sepuluh sampai dua puluh anggota, dan jumlah kelompok perlu dibentuk dalam suatu wilayah. Warga belajar direkrut melalui para pimpinan masyarakat atau melalui media massa. 3. Memilih dan melatih fasilitator kelompok. Fasilitator menciptakan potensi untuk proses pemberdayaan, sehingga perlu dipilih dan dilatih secara hati-hati. Seyogyanya fasilitator berasal dari komunitas yang sama dengan warga belajar serta menerima ide tentang membantu masyarakat mengerjakan sesuatu oleh mereka sendiri. Jika diperlukan fasilitator dari luar disertai fasilitator pendamping dari warga belajar atau anggota masyarakat setempat. Kegiatan pelatihan fasilitator ini berupaya untuk membantu (calon) fasilitator membentuk diri sendiri sehingga memiliki kompetensi-kompetensi kefasilitatoran. Materi pelatihan minimum meliputi kepemimpinan, metodologi pembelajaran, sikap dan kepribadian fasilitator, dan pengenalan program pembelajaran. 4. Pengaktifan kelompok. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pertemuan/rapat kelompok dengan fasilitator atau melalui sebuah lokakarya komunitas, dengan perencanaan bersama fasilitator dan perencana. Lokakarya akan membawa tiga sampai empat orang dari kelompok-kelompok dan membawa dengan cepat membangun tim. Para peserta akan belajar ketrampilan-ketrampilan kelompok, merumukan prioritas masalah dan minat, memulai mengidentifikasi sumber-sumber belajar dan menyusun perencanaan kegiatan awal kelompok setelah usainya lokakarya. 5. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan faslilitator. Pelatihan "in-service" bagi para fasilitator secara berkala sebuln sekali (secara informal) lebih perlu diselenggarakan daripada sebuah sesie pembelajaran (formal).

Pertemuan ini harus dipimpin sendiri oleh (seseorang) diantara mereka sendiri dengan agen perubahan (perencana/pemrakarsa) dan harus mampu menciptakan tukar menukar informasi diantara mereka, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan mengelola tujuan-tujuan atau kebutuhan yang mereka rasakan bersama. 6. Mendukung

aktivitas kelompok yang telah berjalan. Dalam tahapan ini awal aktivitasnya para peserta kegiatan adalah mulai memutuskan apa dan bagaimana mereka (ingin) belajar, berbasis pada karakteristik minat dan masalah mereka sendiri. Ketika kelompok memasuki tahapan ini, perencana perlu menyiapkan bahan-bahan pokok yang diperlukan dan memerankan dukungan moral. Fasilitator barangkali memperoleh bantuan pengembangan material atau aspek khusus dalam proses kelompok. Perlu ditambahkan bahwa para tutor perlu didorong untuk membagi pengambilan keputusan program dalam semua aspek kepada warga belajar. 7. Mengembangkan hubungan diantara kelompok. Jaringan kerjasama antara kelompok ini perlu dibentuk dalam rangka memecahkan masalah yang relatif sangat besar peluangnya untuk terselesaikan dan mendapat tanggapan bagi pemerintah. 8. Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi. Lokakarya ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja para warga belajar dan fasilitator mengenai apa yang telah mereka kerjakan dan menentukan apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Dan selanjutnya diharapkan mereka mereka mampu mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengemban alih tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri.

Kedelapan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, jika dapat dilaksanakan dengan baik, maka program-program pemberdayaan masyarakat menuju kepada peningkatan potensi kearah pelepasan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan akan dapat segera diatasi. Hal ini juga selaras dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kindervatter yang lebih mengarah kepada produk akhir dari sebuah pemberdayaan, yakni masyarakat memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya-daya social, ekonomi, dan politik agar bisa meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan (peningkatan kedudukan di masyarakat) tersebut, menurut Kindervatter (dalam Mulyana; 2008, 49) dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni; (1) akses (access), memiliki peluang yang cukup besar untuk

mendapatkan sumber-sumber daya, (2) daya pengungkit (leverage), meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya (3) pilihan-pilihan (choices), mampu dan memiliki peluang memilih berbagai pilihan, (4), Status (status), meningkat citra diri, kepuasan diri dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya (5) Kemampuan refleksi kritis (Critical reflection capability), menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah. (6) Legitimasi (legitimation), ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. (7) disiplin (discipline), menetapkan sendiri standart mutu pekerjaannya yang dilakukannya untuk orang lain, (8) persepsi kreatif (Creative perception), sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap antar hubungan dirinya dengan lingkungannya.

Dengan memperhatikan berbagai acuan dasar dalam pemberdayaan masyarakat sebagai mana tersebut di atas, maka berbagai elemen-elemen yang ada di masyarakat hendaknya senantiasa berpartisipasi secara aktif dalam rangka menciptakan tatakehidupan yang lebih baik, dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, baik dalam sebuah organisasi kemasyarakatan-organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan; maupun melalui gerakan-gerakan sosial yang menghimpun berbagai kekuatan dan potensi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan sosial ekonomi dan lain sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, 2005, *Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan dan Pelatihan Pertukangan Kayu (Studi Kasus pada program Life Skill pada SKB Bima*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang.
- Anwar, 2006, *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education), Konsep dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.

Kamil, Mustofa, 2009, *Pendidikan Nonformal, Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominkan Jepang*, Alfabeta, Bandung.

Mulyana, Enceng, 2008, *Model Tukar Belajar (Learning Exchange) dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, Alfabeta, Bandung.

Taruna, J.C, Tukiman, 2001, *Pendidikan Nonformal dalam perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, [http://www.SuaraMerdeka, Com/harian/0309/15/Dar20.20.htm](http://www.SuaraMerdeka.Com/harian/0309/15/Dar20.20.htm).